

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Covid-19 yang ditemukan di Tiongkok dan mulai ke seluruh dunia pada tahun 2020 menyebabkan kerugian dari berbagai aspek. Jutaan nyawa melayang akibat infeksi saluran pernapasan yang disebabkan oleh virus *corona*. Virus *Corona* (CoV) adalah virus dengan tingkat penyebaran yang sangat tinggi, penyakit ini merupakan kelas epidemi dengan penularan dari manusia ke manusia yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut parah virus *Corona* 2 (SARS-CoV-2). Virus ini menyebar dengan cepat dari daratan Tiongkok ke negara-negara sekitarnya mulai dari Jepang, Thailand, dan Korea Selatan.

Jepang sebagai salah satu negara yang pertama kali terjangkit Covid-19 langsung mengumumkan situasi darurat setelah mulai banyaknya warga sipil yang mengalami infeksi. Kebijakan dalam konstitusi Jepang menutup perbatasan dengan membatasi orang asing masuk ke negara mereka, namun mereka tidak memaksa masyarakatnya untuk menghentikan mobilitas pribadi. Jepang menerapkan beberapa langkah pengendalian perbatasan untuk membatasi jumlah warga asing yang masuk, seperti dengan penolakan penerbangan, tindakan karantina, pembatasan bandara/pelabuhan, penangguhan visa, penangguhan tindakan bebas visa, dan pelarangan izin masuk kembali.

Seiring dengan berjalannya waktu, pandemi mulai dikendalikan secara nasional dan internasional, sehingga Perdana Menteri Jepang mulai mempertimbangkan untuk membuka pintu perbatasannya secara massal untuk merevitalisasi industri pariwisata. Tetapi, secara tiba-tiba Covid-19 mulai

meningkat di Tiongkok, sehingga Jepang menutup pintu perbatasannya bagi pengunjung Tiongkok dan hal ini menimbulkan kontroversi. Oleh karena itu, penulis meneliti apa saja elemen yang melatarbelakangi pembuatan kebijakan kontrol perbatasan Jepang ini menggunakan konsep *decision making process* (proses pembuatan keputusan) oleh Ahmed Aref Al Kafarneh yang mengkaji konteks pembuatan keputusan melalui dua konteks yaitu konteks domestik dan internasional. Konteks domestik terdiri dari beberapa elemen yaitu sistem politik dan ekonomi, partai politik, opini publik, dan pelobi. Selanjutnya, konteks internasional yang terdiri dari sistem publik internasional dan krisis politik internasional.

Hasilnya menunjukkan bahwa sistem politik dan ekonomi di Jepang menjadi pertimbangan dalam pembuatan keputusan. Hal ini mengacu kepada sistem politik yang berlaku di Jepang yaitu sebagai negara demokrasi yang akan mempertimbangkan berbagai aspek dalam perumusan kebijakan mereka. Selain itu, juga mengacu kepada sistem ekonomi Jepang yang mengalami ketidakstabilan di masa pandemi ini, dengan ketergantungannya terhadap Tiongkok maka Jepang harus mampu mencari mitra baru yaitu Korea Selatan yang berhasil berkontribusi dalam kenaikan kunjungan pariwisata Jepang pada awal 2023.

Dalam menjelaskan keterkaitan antara sistem ekonomi Jepang terhadap kontrol perbatasan Jepang perlu ditinjau bahwa keluar masuknya orang atau lebih dikenal dengan kebijakan imigrasi juga dipengaruhi oleh kebutuhan ekonomi. Perekonomian Jepang sebelum datangnya Covid-19 memiliki iklim yang mendukung untuk mendorong peningkatan perekonomian yang juga diimbangi dengan impor untuk memenuhi permintaan domestik.

Selanjutnya, partai politik sebagai salah satu elemen dalam pembuatan kebijakan. Jepang memiliki satu partai politik yang dominan berkuasa sejak tahun 1955 yaitu Liberal Democratic Party (LDP). LDP disebut partai dominan karena selalu mendominasi jumlah kursi dalam parlemen. Tetapi ada peristiwa di mana LDP bisa dikalahkan oleh partai lain dalam pemilihan umum, hal ini disebabkan oleh kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap LDP. Penulis berpendapat bahwa PM Fumio Kishida yang juga merupakan ketua umum LDP melibatkan kepentingan partainya dalam keputusan kontrol perbatasan ini, karena apabila ia mengambil keputusan yang berakibat kepada peningkatan kasus Covid-19 di Jepang maka kemungkinan hal itu akan memicu kemarahan publik dan berimbas kepada elektabilitas partainya.

Elemen selanjutnya yaitu pelobi (Lobbyist) hal ini melibatkan orang-orang memiliki kepentingan ekonomi seperti para pebisnis yang memiliki relasi perdagangan dengan pengusaha di luar negeri, sehingga untuk menjaga hubungan tersebut, mereka akan melobi para pengambil keputusan untuk menghasilkan kepentingan mereka. Himpunan pebisnis Jepang mendesak pemerintah untuk membuka perbatasan dan menyambut datangnya pengunjung dari luar negeri khususnya dari Tiongkok karena mereka memiliki hubungan bisnis yang erat dengan pebisnis dari Tiongkok.

Opini publik menjadi elemen selanjutnya yang menjadi pertimbangan para pengambil keputusan. Jepang sebagai negara demokrasi tentu masyarakatnya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat mereka terhadap pemerintah. Selama pandemi masyarakat Jepang juga kerap mengkritik kebijakan dan program pemerintah mereka, khususnya dalam menangani wabah Covid-19.

Kekuatan pendapat masyarakat terlihat ketika pemerintah Jepang bersikeras tetap mengadakan Olimpiade Tokyo pada tahun 2021 dan menimbulkan peningkatan kasus Covid-19 setelahnya. Hal ini menyebabkan PM Yoshihide Suga mengundurkan diri dari jabatannya dan ia tidak terpilih lagi pada pemilihan umum Jepang. Penulis berpendapat bahwa dengan adanya kontrol perbatasan ini yang bertujuan untuk mencegah kenaikan kasus Covid-19 di Jepang dan sebagai usaha agar kepercayaan publik akan kembali terhadap pemerintah sehingga para pengambil keputusan mempertimbangkan opini publik dalam kebijakan ini.

Pada faktor internasional yaitu sistem publik internasional, hal ini meliputi pola interaksi negara-negara di dunia dengan adanya organisasi internasional dan rezim internasional yang pada akhirnya melibatkan proses pembuatan keputusan. Rezim yang diratifikasi oleh sebuah negara menekan mereka untuk memutuskan kebijakan berdasarkan aturan yang telah disepakati dalam rezim tersebut, atau mengikuti keputusan sebuah blok. Tetapi dalam keputusan kontrol perbatasan Jepang, penulis tidak menemukan indikasi tersebut sehingga kemungkinan para pembuat keputusan tidak mempertimbangkan unsur ini.

Terakhir, elemen krisis politik internasional yang mana merupakan sebuah fenomena yang mengganggu kestabilan politik internasional yang pada akhirnya memaksa membuat keputusan secara cepat untuk menyelamatkan kepentingan negara mereka. Krisis global yang dihadapi saat ini adalah Covid-19 yang menyerang hampir ke seluruh negara di dunia termasuk di Jepang. Penulis berpendapat bahwa Jepang mempertimbangkan fenomena ini dalam proses pembuatan keputusan untuk mencegah jumlah infeksi naik setelah adanya strain baru di Tiongkok, selain itu juga menimbang apabila mereka tidak memitigasi hal

ini dengan baik akan menimbulkan kemarahan publik dan hilangnya kepercayaan terhadap pemerintah.

5.2 Saran

Setelah melakukan penelitian mengenai kontrol perbatasan Jepang terhadap wisatawan Tiongkok dalam pemulihan pariwisata pasca Covid-19, penulis memiliki beberapa saran dalam pengembangan penelitian dengan topic yang hampir serupa. Pertama, penelitian yang meneliti lebih dalam mengenai keterlibatan partai politik dalam negara demokrasi yang berpengaruh untuk melihat seberapa jauh peran partai dominan dan oposisi dalam rancangan kebijakan. Kedua, penelitian yang meninjau lebih dalam tentang kebijakan-kebijakan yang tepat untuk di ambil ketika krisis dan bagaimana mitigasi krisis untuk meminimalisir dampak yang akan terjadi, dan bagaimana pula menanggulangi dampak tersebut agar tidak terulang di masa depan.

